



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

Kebijakan dan Dukungan Insentif Fiskal untuk Percepatan Investasi Energi

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF

*Memajukan Ekonomi Energi Melalui Kebijakan dan Regulasi Investasi yang Berkelanjutan
Jakarta, 12 September 2024*



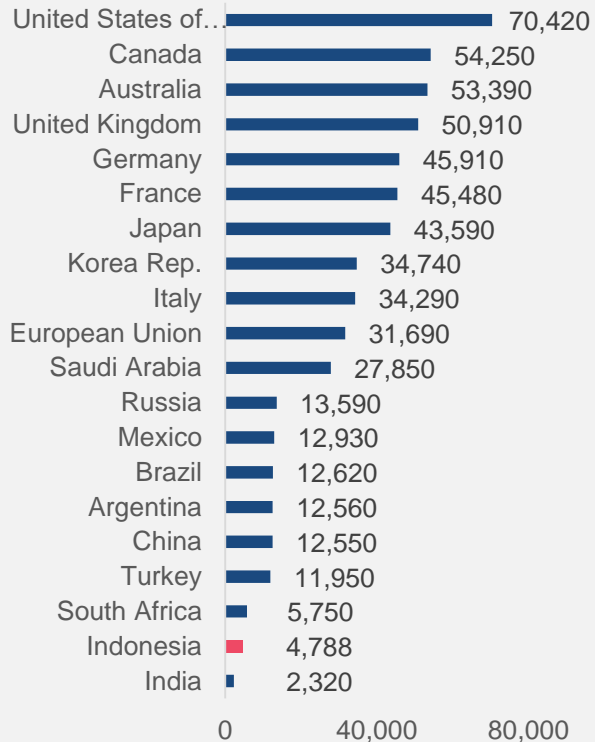
Indonesia Perlu Meningkatkan PDB per Kapita dengan **Pembangunan Rendah Karbon dan Keuangan Berkelanjutan**

PDB per kapita Indonesia meningkat **10%** pada 2022 tetapi masih di peringkat **19** di antara negara-negara G20

Paritas Daya Beli Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Amerika, Eropa, dan China.

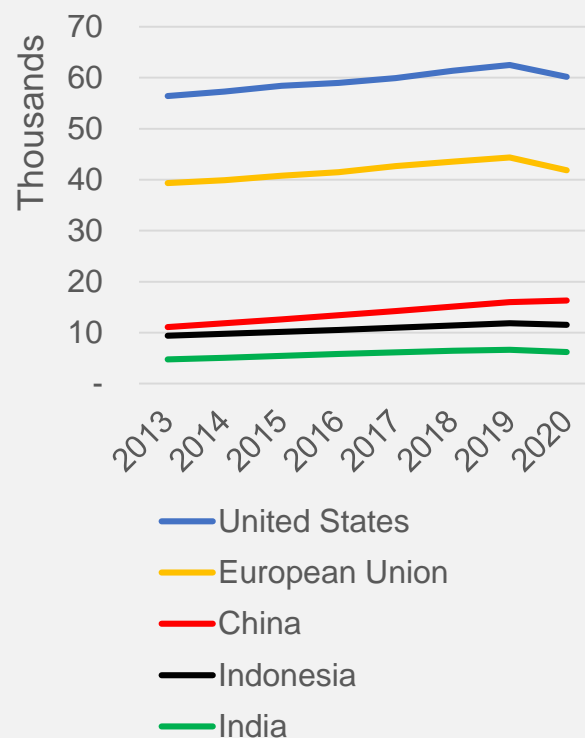
Namun demikian, peningkatan PDB per kapita Indonesia selama dua dekade ini (2000-2022) lebih tinggi daripada kenaikan emisi per kapita.

GDP per capita of G20 Countries by 2022 (in USD)



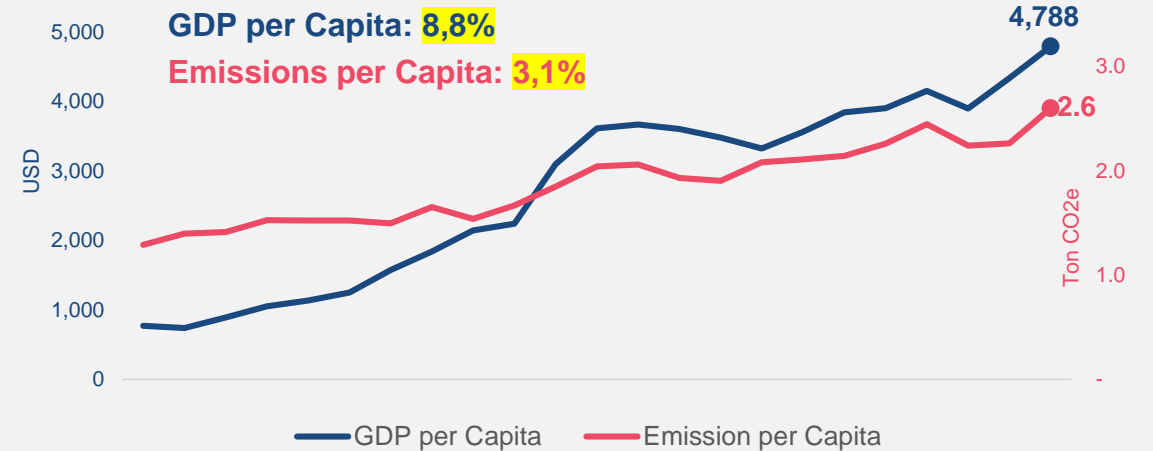
Source: World Bank (2023)

GDP per capita, PPP (constant 2017 international \$)



Sources: World Development Indicators 2023 processed.

Compounded Annual Growth Rate (CAGR) from 2000-2022



Source: World Bank, processed

Capaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan kebijakan industrialisasi rendah karbon dan keuangan berkelanjutan

Komitmen Perubahan Iklim dan Tantangan Finansial

Visi dan komitmen jangka panjang Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)

Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050

Sustainable and Green Economy

Visi Jangka Panjang

"A Just, Prosperous, and Developed Country in 2045"

"A Low Carbon and Climate Resilient Nation"

"Net Zero Emission by 2060 or sooner"

Enhanced NDC Target & financial needs (Mton CO₂e)

	FOLU	Energy	IPPU	Waste	Agriculture	Total	
CM 1	31,89%	500	358	7	40	10	915
CM 2	43,20%	729	446	9	43,5	12	1.239,5

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada UNFCCC dengan target penurunan emisi yang lebih ambisius pada tahun 2030. Kebutuhan finansial untuk Enhanced NDC masih dalam proses estimasi. Perkiraan kebutuhan finansial untuk mencapai target sebelumnya pada updated NDC Indonesia (29% pada tahun 2030) adalah sekitar USD 281,23 milyar (IDR 4.002 triliun).

Konsekuensi Pendanaan Mitigasi

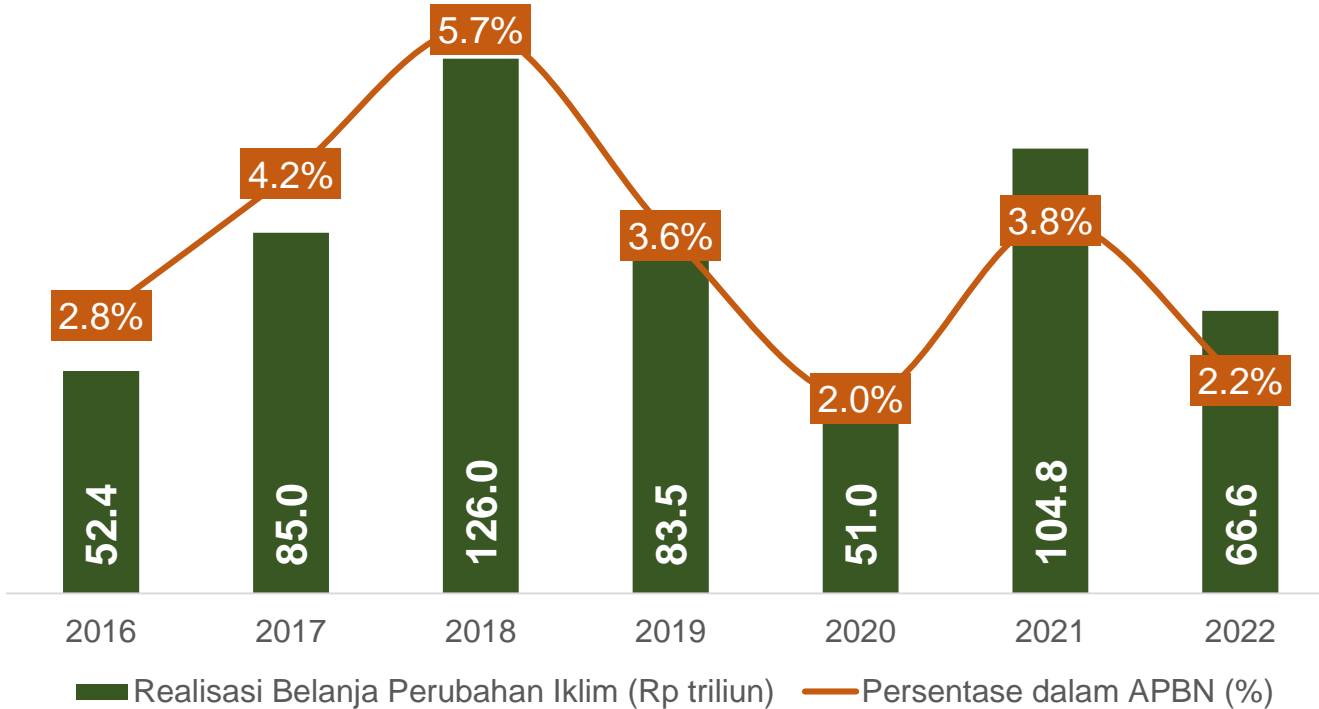
Land & Forestry	Energy & Transportation	IPPU	Waste	Agriculture	TOTAL	MITIGASI
309,01	3.500,00	0,93	185,27	7,23	4.002,44	IDR Triliun
21,86	245,99	0,07	12,99	0,50	281,23	USD Milyar

Untuk adaptasi, Indonesia berfokus pada tiga bidang ketahanan: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Ketiga bidang ketahanan tersebut telah dijabarkan dalam Peta Jalan Adaptasi NDC yang terutama mencakup beberapa bidang yaitu pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem.

Kebutuhan finansial untuk melaksanakan aksi adaptasi diperkirakan sekitar USD 2,3 – 12,14 miliar untuk membangun ketahanan dan kapasitas adaptif guna mengurangi risiko kerugian hingga 2,87% PDB.



Pengeluaran Pemerintah Pusat untuk Kegiatan Terkait Perubahan Iklim Tahun 2016 - 2022



KUMULATIF

Rp569 triliun atau USD 37,9 miliar

RATA-RATA PER TAHUN

3,5% dari APBN

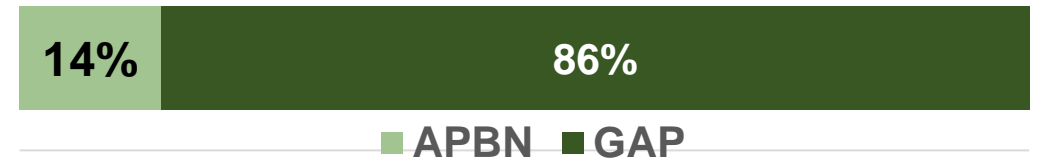
Rp 81,4 triliun atau USD 5,4 miliar

PROPORSI AKUMULASI AKSI (2016-2022)



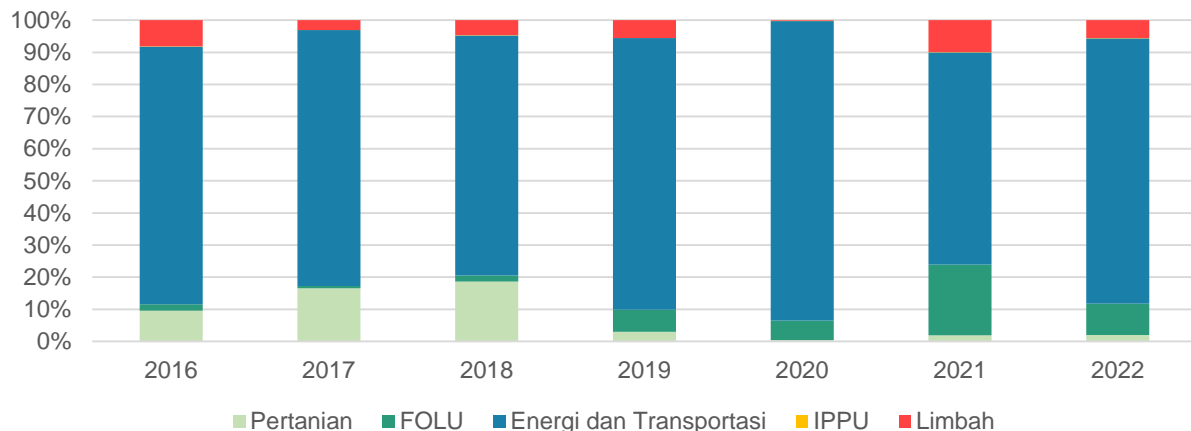
PROPORSI SUMBER DANA PER TAHUN

(Hanya aksi mitigasi 2018-2022, dibandingkan kebutuhan dana mitigasi dalam 3rd BUR)

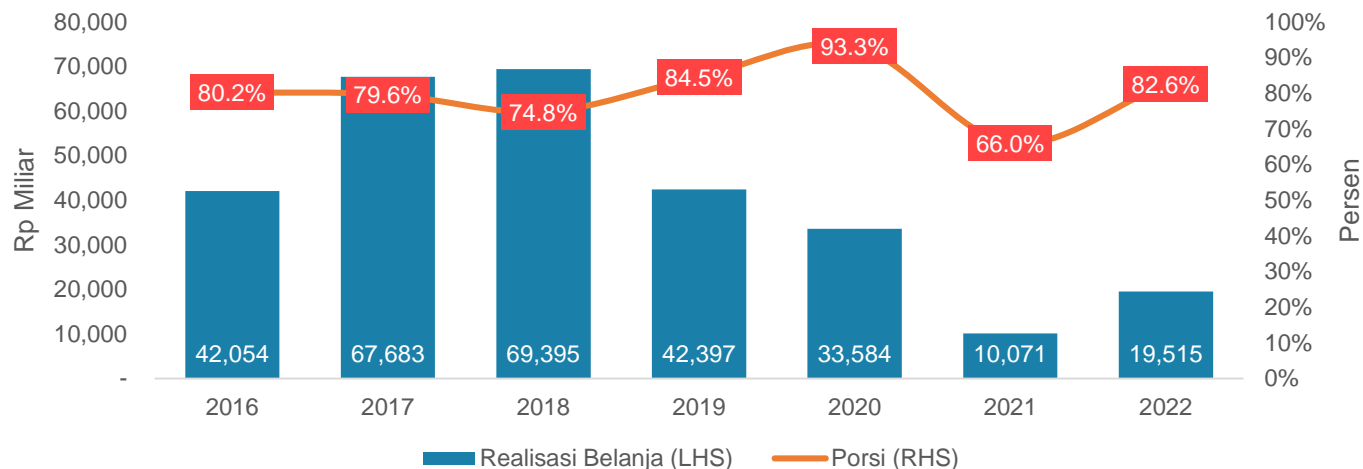




Komposisi Anggaran Mitigasi & Co-Benefit



Sektor Energi dan Transportasi



**ANGGARAN DAN REALISASI
AKSI MITIGASI PADA SEKTOR ENERGI
DAN TRANSPORTASI**

Secara komposisi anggaran selalu dominan setiap tahunnya meski cukup fluktuatif pada dua tahun terakhir,

Namun secara nominal, sejak tahun 2018 menunjukkan tren penurunan

Kebijakan Fiskal terkait Perubahan Iklim

PENDAPATAN NEGARA



Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menjaga **keberlanjutan sumber daya alam** dan **pengelolaan lingkungan**, mendorong **investasi energi terbarukan** dan **teknologi bersih**, serta memastikan **transisi yang adil dan terjangkau**.

- Fasilitas pajak untuk mendorong investasi energi terbarukan, KBLBB, dan teknologi bersih (potongan PPN, potongan pajak properti, *tax allowance*, *tax holiday*, potongan PPnBM untuk KBLBB)
- Pembebasan bea masuk untuk mesin dan peralatan energi terbarukan dan/atau teknologi bersih.
- PNBP dari pengelolaan kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
- Persiapan pengenaan pajak karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batubara

BELANJA NEGARA



Kebijakan pengeluaran negara juga mendukung **pembangunan rendah karbon dan tahan iklim**, memperkuat kapasitas pengeluaran daerah melalui **transfer fiskal ekologis**, menyediakan penyangga fiskal untuk **pembiayaan bencana**, dan mengembangkan **infrastruktur hijau**.

- Anggaran/pengeluaran mitigasi dan adaptasi Kementerian/Lembaga
- Transfer Fiskal Ekologis, transfer fiskal terkait iklim secara tidak langsung seperti Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dana insentif daerah (DID), dana bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (DBH-DR, DBH Panas Bumi).
- Pembiayaan Risiko Bencana

PEMBIAYAAN ANGGARAN



Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk penghijauan pembiayaan melalui kerangka **ESG** dan mempromosikan instrumen **pembiayaan inovatif** yang lebih berkelanjutan melalui penerapan **Kerangka Green Bond/Sukuk** dan **SDG Government Securities Framework**.

- Penerbitan Global Green Sukuk dan Retail Green Sukuk
- Penerbitan Obligasi SDG yang terdiri dari Social Focus, Green Focus, dan Blue Focus.



Insentif Fiskal untuk EBT dan KBLBB



Tax Holiday PMK 130/2020

Pengurangan PPh badan 100% sampai 20 thn untuk industri pionir: industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya (termasuk mobil dan sepeda motor listrik, mesin (motor listrik) utk kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik) dan industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, termasuk smelter nikel untuk produksi baterai.



Tax Allowance PP 78/2019

Fasilitas PPh untuk bidang usaha tertentu di daerah tertentu, termasuk tambang nikel, industri batu baterai, dan kendaraan bermotor.



Super Deduction Vokasi PPh PMK 128/2019

Fasilitas PPh hingga 200% untuk kegiatan vokasi industri, dengan kompetensi yang mendorong ekosistem kendaraan listrik.



Super Deduction R&D PPh PMK 153/2020

Fasilitas PPh hingga 300% untuk kegiatan R&D di Indonesia, termasuk R&D tentang kendaraan listrik dan komponennya.



Fasilitas Pajak KEK PP 40 Tahun 2021 – PMK 33 Tahun 2021

Fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus berupa: Tax Holiday KEK, Bea Masuk Dibebaskan atas Impor Barang Modal, PPN Tidak Dipungut atas Impor/penyerahan Barang Modal



Pembebasan Bea Masuk

PMK 176 Th 2009 jo PMK 188 Th 2015
PMK 66 Tahun 2016
PMK 26/ 2022

Pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal dan pengembangan industri pembangkit listrik. Bea Masuk 0% untuk impor mobil listrik incompletely knocked down (IKD) dan Bea masuk 0% untuk impor mobil listrik completely knocked down (CKD) melalui beberapa kerjasama FTA/CEPA termasuk Korea dan China



PPN DTP & dibebaskan PP 49/2022 PMK 38/2023

PPN dibebaskan untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, impor dan perolehan mesin dan peralatan pabrik (termasuk industri kendaraan bermotor). PPN Ditanggung Pemerintah atas mobil listrik dan bus listrik, sebesar 11%/10%/5% dari nilai jual sesuai nilai TKDN produk



PPnBM 0% PP 74 tahun 2021

PPnBM 0% atas kendaraan listrik yang menggunakan teknologi battery electric vehicles, atau fuel cell electric vehicles



Insentif Pajak Daerah (PKB) Permendagri 6 tahun 2023

Insentif pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 0%



Subsidi Pembelian Motor Listrik

Permen Perindustrian 21/ 2023

Subsidi pembelian motor listrik senilai 7 juta rupiah per orang.



Estimasi Belanja Perpajakan yang mendorong aksi iklim (dalam miliar rupiah)

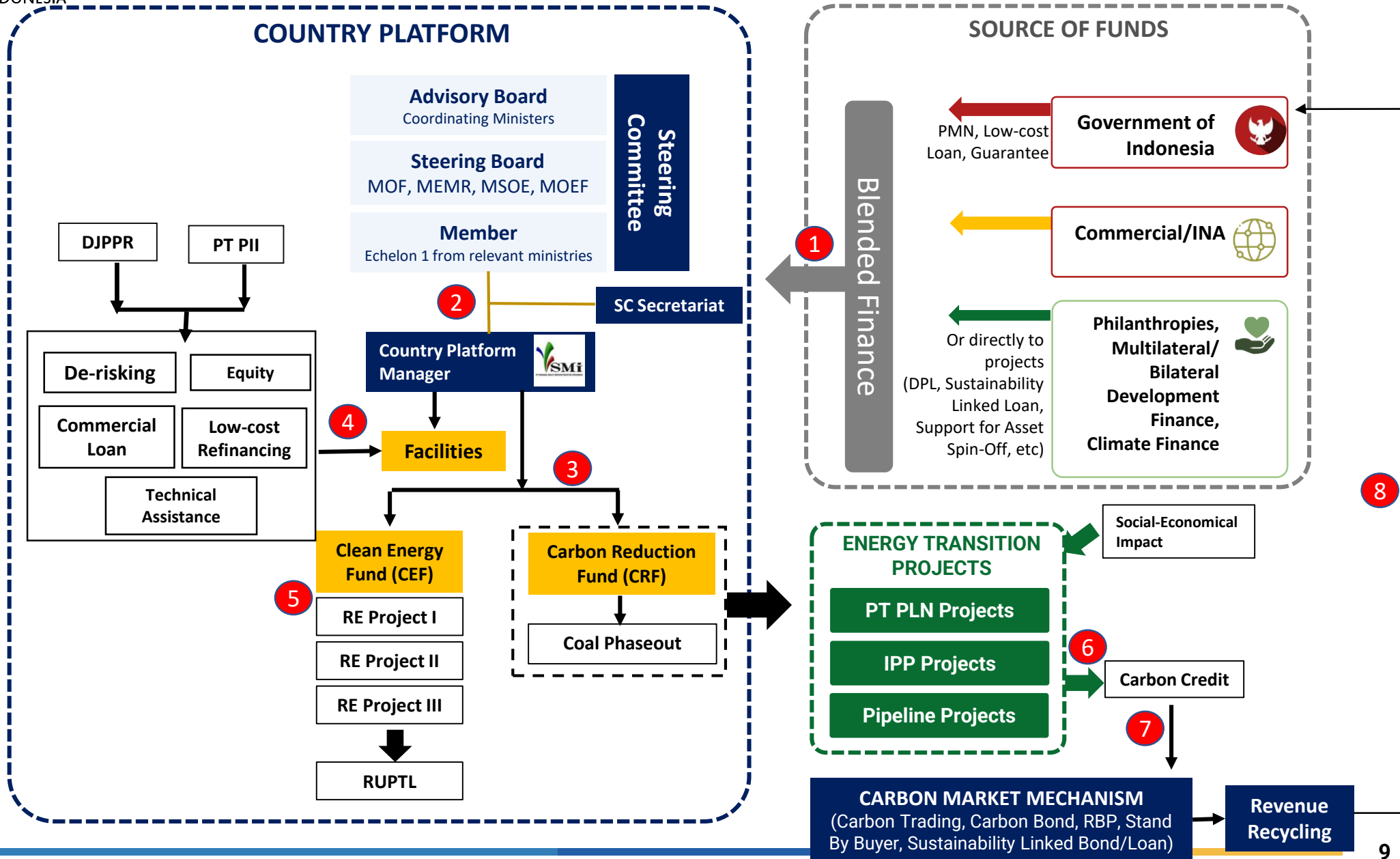
No	Fasilitas	Besaran Tax Expenditure (Estimasi)				Proyeksi		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang, dan barang untuk konservasi alam	2	E	E	E	E	E	E
2	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon.	2267	1201	1543	2316	3030	3679	4466
3	PPnBM 0% untuk kendaraan bermotor yang menggunakan battery electric vehicles atau fuel cell electric vehicles	-	-	-	390	1201	3603	3964
4	Tax holiday untuk pembangkit EBT	0	13	9	12			
5	Tax allowance untuk pembangkit EBT	76	101	93	100			
6	PPh Ditanggung Pemerintah untuk Panas Bumi	2237	2965	2402	3213	2810	2968	3155
7	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi	-	36	30	22			
8	Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	E	1	E	E	E	E	E
9	Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam	1	E	E	E	E	E	E
10	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi	2	2	2	2	1	1	1
11	PPN lebih rendah untuk kendaraan hybrid	-	-	-	80	898	968	1065
12	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi	442	36	30	22	24	27	29
	TOTAL	5027	4355	4109	6157	7964	11246	12680
	TOTAL AKUMULATIF	5027	9382	13491	19648	27612	38858	51538



Platform Transisi Energi (ETM Country Platform)

Keterangan Alur

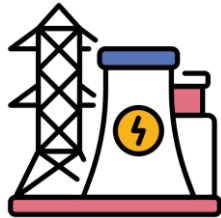
- 1 Terdapat aliran dana campuran masuk ke CP melalui PT SMI.
- 2 SC memberikan arahan program prioritas ke CP Manager.
- 3 CP melakukan proses *early retirement* sesuai peta jalan.
- 4 CP dapat mendapatkan dukungan dari MoF utk beberapa model skema finansial
- 5 Mobilisasi dana CEF utk transformasi PLTU ke EBT dengan memperhatikan RUPTL.
- 6 ETM menghasilkan *carbon credit* yang dapat diperdagangkan.
- 7 *Carbon credit* ETM diperdagangkan di pasar karbon.
- 8 *Revenue cycle* dari ETM masuk dan dikelola via PNBP.



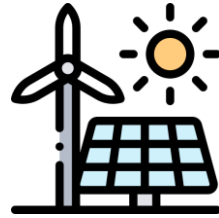


Jenis Proyek dan Fasilitas Platform Transisi Energi (berdasarkan PMK 103/2023)

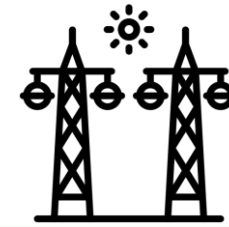
Jenis Proyek yang Dapat Diberikan Fasilitas Platform Transisi Energi



Pensiun Dini PLTU
Batubara



Pembangunan EBT



Transmisi dan
Distribusi

Jenis Fasilitas Platform Transisi Energi

Investasi Pemerintah

Hal ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan eksisting di bidang investasi pemerintah

Jaminan Pemerintah

diatur dalam peraturan jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN

Dukungan untuk KPBU

dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah sesuai peraturan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

Dukungan Lainnya

dukungan lainnya yang diatur di peraturan bidang fiskal